

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan zaman dan teknologi membuat masyarakat semakin sadar akan kebutuhan kesehatannya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya permintaan akan pelayanan kesehatan. Untuk itu dibutuhkan jumlah tenaga kesehatan yang memadai agar masyarakat di daerah dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan akses yang relatif mudah. Hal ini tentunya akan menghasilkan pola pikir masyarakat untuk hidup di lingkungan masyarakat dengan perilaku yang jauh lebih sehat.

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan. Adapun yang termasuk kedalam kelompok tenaga kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 antara lain tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya. Sementara yang termasuk kedalam tenaga non kesehatan, antara lain staf administrasi, staf keuangan, teknisi, staf sistem informasi, petugas keamanan dan sebagainya.⁽¹⁾

Kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan milik pemerintah secara lintas sektor termasuk pemerintah daerah dan swasta, serta mengantisipasi keadaan darurat kesehatan dan pasar bebas di era globalisasi. Di samping itu kebutuhan

tenaga kesehatan guna mendukung manajemen kesehatan (administrator dan regulator), pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, perlu pula disusun kebutuhannya. Pengelolaan perencanaan, sumber daya pendukung dan pengembangan perencanaan penting untuk ditingkatkan.⁽²⁾

Kementerian Kesehatan terus berusaha untuk berorientasi ke masa depan yang mengedepankan profesionalis mendalam pelaksanaan program - program kesehatan. Salah satu upaya Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan profesionalisme ialah dengan menetapkan jabatan fungsional administrator kesehatan (jabfung adminkes) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 42/ Kep/ Menpan/ 12/ 2000.

Jabatan Fungsional Tertentu merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian maupun keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan prestasi kerja.⁽³⁾

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai jabatan fungsional adminkes dan angka kreditnya, dalam keputusannya menyebutkan peran dan fungsi adminkes adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab secara penuh untuk melakukan analisis kebijakan di bidang

administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.

Berdasarkan survei awal di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang diperoleh data jumlah adminikes di Dinas Kesehatan Kota Padang berjumlah 12 orang yang tersebar di beberapa bidang dan seksi yang ada di Dinas Kesehatan Kota Padang. Sementara Puskesmas Belimbing merupakan satu-satunya Puskesmas yang memiliki tenaga adminikes di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang.

Salah satu upaya untuk mengetahui sejauh mana pentingnya peranan adminikes di wilayah Dinas Kesehatan Kota Padang penulis tertarik untuk melakukan analisis beban kerja tenaga adminikes yang ada di Dinas Kesehatan Kota Padang menggunakan metode *WISN*. Analisis penghitungan beban kerja perlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan akan tenaga administrator yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang. Bila terjadi kekurangan tenaga adminikes, tentu upaya melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan tidak berjalan dengan baik.

Perhitungan beban kerja dengan metode *WISN* telah dilakukan pada beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu pada penelitian Fandi Kurniawan tentang Analisis Beban Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat Bidang Epidemiologi di Puskesmas Kota Semarang Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan waktu kerja yang tersedia bagi petugas epidemiologi adalah sebesar 271 hari/orang/tahun atau 216 jam/orang/ tahun atau 16260 menit/orang/tahun. Standar kelonggaran yang ada di Puskesmas Kota Semarang berjumlah 0,024 jam/tahun. Beban kerja petugas epidemiologi di Puskesmas se – Kota Semarang adalah tinggi (rasio *WISN* < 1).⁽⁴⁾

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penghitungan Beban Kerja Tenaga Adminkes di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2018”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana beban kerja tenaga adminkes di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui tingkat beban kerja tenaga adminkes berdasarkan analisis beban kerja di Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2018.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diketuainya kegiatan pokok dan tambahan tenaga adminkes yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang.
2. Diketuainya waktu kerja tersedia tenaga adminkes yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang.
3. Diketuainya standar beban kerja tenaga adminkes yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang.
4. Diketuainya standar kelonggaran tenaga adminkes yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Diketuainya tingkat beban kerja tenaga adminkes yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang.



6. Diketuainya tingkat kebutuhan tenaga adminkes yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang

Sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dalam menentukan arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga adminkes.

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

Sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat Universitas Andalas Padang.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti serta dapat dijadikan sebagai wadah dalam pengimplementasian ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis tingkat beban kerja tenaga adminkes di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang dengan sasaran penelitian adalah tenaga adminkes. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah beban kerja tenaga adminkes di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang, yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara mendalam, serta telaah dokumen.